

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

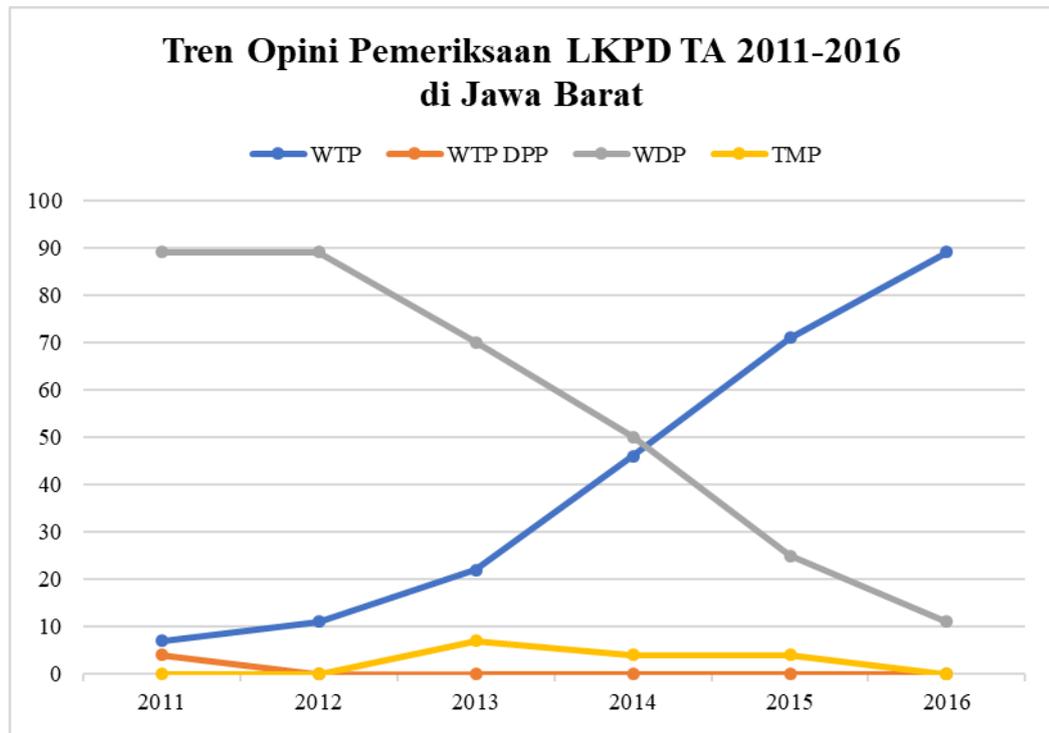
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, seperti yang terdapat dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adapun komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dimaksud meliputi Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK akan memperoleh opini, seperti yang diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksian yakni: opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*; opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*; opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*; dan pernyataan menolak memberikan opini (TMP) atau *Disclaimer of Opinion*. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Setyowati dan Wikan, 2014).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran kinerja pemerintahan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), harus memenuhi empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan, agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BPK RI Perwakilan Jawa Barat telah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2016 kepada 28 Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat, tren hasil opini pemeriksaan LKPD TA 2015 – 2016 yaitu, pada TA 2015 Pemda yang memperoleh opini WTP sebesar 71%; opini WDP sebesar 25%; dan opini TMP sebesar 4%. Sedangkan pada TA 2016 adanya peningkatan dimana Pemda yang memperoleh opini WTP sebesar 89% dan opini WDP 11% (BPK, 2017).



Gambar 1.1

Tren Opini Pemeriksaan LKPD TA 2011 – 2016 di Jawa Barat

Sumber : bandung.bpk.go.id

DPRD Jawa Barat menargetkan seluruh Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya (Sundari, 2017). Hal tersebut juga diungkapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dimana target tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi tahun 2014 – 2018 untuk wilayah Jawa Barat sebesar 100% (Rencana Kerja Tahunan, 2016).

Tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya dapat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan (Wibawa, Ni, dan Gede, 2017). Dengan begitu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual/ *Cash Toward Accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010. Hal ini berarti implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan pada tahun 2015 (Satrio, Indrawati, dan Ardi, 2016). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sendiri menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN / APBD.

Manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia (Ranuba, Sifrid, dan Sherly, 2015). Penerapan SAP berbasis akrual tentunya menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah, hingga kini belum sepenuhnya paham akan penerapan SAP berbasis akrual tersebut, meskipun semua daerah telah menerapkan namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan (Aulia, 2017).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2015, yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yaitu, adanya aset yang belum dicatat pada neraca atau nilai aset di neraca berbeda dengan catatan pendukungnya; adanya nilai aset yang belum direkonsiliasi antara pencatatan bidang akuntansi dengan pengelola aset; dan adanya aset yang belum diinventarisir (IHPS, 2015). Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2016, yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yaitu, pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan persediaan dan beban persediaan belum sepenuhnya memadai; pencatatan utang jangka pendek lainnya tidak seluruhnya didukung dengan perincian utang yang lengkap; dan entitas terlambat menyampaikan laporan (IHPS, 2016).

Selain Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah (Kiranayanti dan Ni, 2016). Sistem Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah, proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai, tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan (Rahmani, 2011).

Faktanya masih ada kelemahan yang terjadi dalam penerapan SPIP pada tahun 2016 yaitu, adanya pemda yang belum memiliki mekanisme pencairan dan pengambilan jaminan; belum menetapkannya tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja subsidi; dan terdapat rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti (IHPS, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dan Dwi Seftihani Riana yang berjudul Pengaruh Impelementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Kota Bandung, sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pemda seluruh Jawa Barat.

Dari hasil uraian latar belakang diatas, penulis akan membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 – 2016 ”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Belum tercapainya target kualitas laporan keuangan Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat;
2. Belum tercapainya target kualitas laporan keuangan Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat disebabkan belum maksimalnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual;
3. Belum tercapainya target kualitas laporan keuangan Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat disebabkan belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
3. Bagaimana kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat

2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Sistem Pengendalian Internal dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang aplikasi ilmu teori pada perkuliahan dengan penerapan materi yang sebenarnya. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Bahan masukan kepada para Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.